

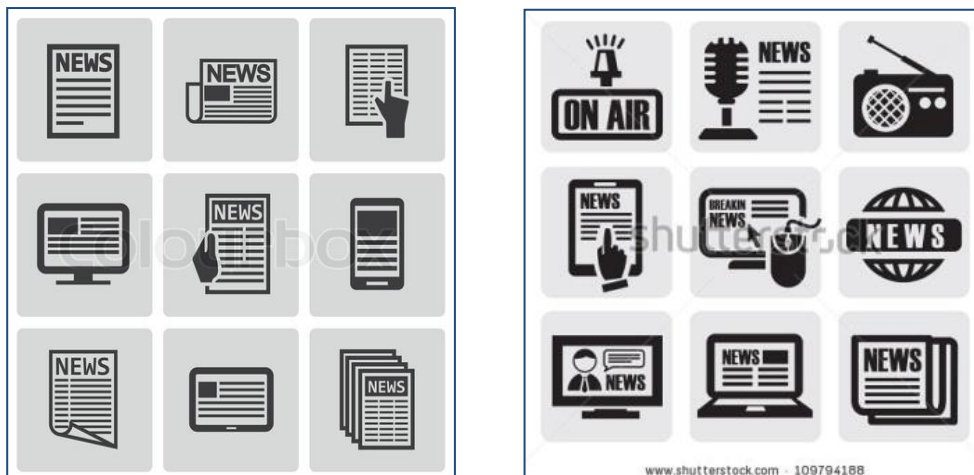


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Hukum & Aparatur

Kamis, 15 November 2018



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2018**

Daftar Isi

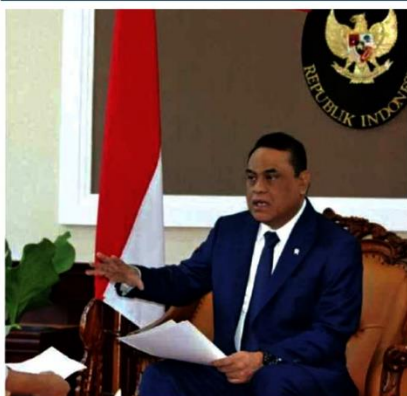
1. ASN INDONESIA HARUS LEBIH KOMPETEN DAN KOMPETITIF (*Media Online Kompas*)
2. KUALITAS BIROKRASI DIPERTARUHKAN (*Media Online Kompas*)

KOMPAS

kamis

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

15 November 2018



ASN Indonesia Harus Lebih Kompeten dan Kompetitif

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah menyusun suatu *grand design* Smart ASN. Ini merupakan sebuah rencana strategis untuk meningkatkan kualitas dan daya saing para aparatur sipil negara (ASN).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Syafrudin, Kamis (8/11/2018) di Kementerian PAN-RB, Jakarta. Ia juga menjelaskan tentang profil yang dicita-citakan terlampir pada ASN 2024.

"Kita ingin memiliki ASN yang berintegritas, nasionalis, profesional, dan berwawasan global. Dunia saat ini sudah sangat terbuka. Pemerintahan di seluruh dunia hampir semuanya terbuka. Memang masih ada negara-negara yang dalam tanda kutip masih mempunyai ideologi yang amat kuat, seperti Korea, Myanmar, dan Mongolia. Namun, pelan-pelan mereka akan terbuka juga," terang Syafrudin.

Pemerintahan, lanjut Syafrudin, merupakan implementasi dari sebuah

negara dalam periode tertentu. Pilar utamanya adalah ASN dan aparat lain dari negara ini contohnya TNI, Polri, dan penegak hukum lainnya. Pilar-pilar ini ingin berpadu menanggapi keinginan rakyat.

"Untuk itu, Smart ASN disusun agar menjadi arah rencana pembangunan strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024. Rencana tersebut juga menjadi bagian dan mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 yang sebagaimana sudah diatur pada UU Nomor 17 Tahun 2007," jelasnya.

Syafrudin memberi gambaran sekilas tentang komposisi ASN saat ini, yakni sebanyak 4,38 juta orang. Dari jumlah tersebut, tenaga pendidikan guru menempati porsi paling besar yang mencapai 1,6 juta pegawai serta tenaga pengadministrasi umum sebanyak 1,67 juta

jiwa, berikutnya diisi oleh struktural, jabatan fungsional, kesehatan, dan lain-lain.

"Dari angka 4,38 juta, itu harus kita akui dulunya ada yang sebagian direkrut tidak dari hal-hal yang kompetitif. Contohnya, ada 26 persen pegawai yang diangkat begitu saja. Ini misalnya tenaga-tenaga honoror yang sudah bekerja sekian lama kemudian diangkat padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini terjadi pada periode 2005-2013. Setelah itu, berbeda, tidak ada lagi pengangkatan," kata Syafrudin.

Sering tekad pemerintahan ingin memperbaiki kualitas SDM-nya, lahiriah UU Nomor 5 Tahun 2014. "Pertanyaannya, yang 26 persen tadi apakah kompetitif? Saya yakin kita akan berpendapat berbeda-beda. Saya tidak mengatakan itu tidak kredibel, tapi saya yakin hasilnya berbeda dengan jika kita mendapat pegawai dari yang melalui seleksi ketat. Sebab, mereka tersaring dari sekian banyak orang," lanjut Syafrudin.

Itulah sebabnya, pemerintah ingin ASN kita ke depannya memiliki daya saing, mengiklaim zaman, dan terbuka kepada publik. Apalagi publik sedang antusias menyongsong negara yang terbuka kepada mereka.

"Kita, para ASN, itu adalah pelayan publik, bagaimana kita memuaskan

rakyat. Komponen utama kita adalah rakyat. Bangsa itu implementasinya rakyat. Oleh karena itu, kita harus memberikan contoh dan melayani dengan baik masyarakat kita," ujar menteri yang sebelumnya menjabat Wakilpolri ini.

Menurut Syafrudin, dunia saat ini sudah berbeda dan berkembang amat cepat. Oleh karena itu, di dalam implementasi UU Nomor 5 Tahun 2014, lahiriah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Salah satu isinya, PNS mendapat hak 20 jam untuk belajar. "Jadi, jika para PNS ini telah masuk ke formasi masing-masing, mereka berhak terus dikembangkan kapasitasnya selama total 20 jam per tahun."

Kementerian PAN-RB sendiri telah mengembangkan model-model pembelajaran bagi para PNS untuk menghasilkan suatu kapasitas. Wujudnya berupa *e-learning*, *coaching*, *monitoring*, dan *entrepreneurship* (kewirausahaan), melalui sistem pembelajaran ASN Corporate University.

Mengejar "index human capital"

Selidik menyinggung tentang seleksi CPNS tahun ini, Syafrudin mengatakan bahwa peningkatannya mencapai 3,5 juta

peserta. Pemerintah menargetkan dapat menyerap sekitar 238 ribu calon pegawai ASN. Jumlah ini sebenarnya tidak menambah, tetapi menggantikan yang pensiun.

"Tahun ini, kita rekrut 110 ribu tenaga pengajar mulai dari dosen hingga guru. Ini untuk menutup kebutuhan tahun ini dan tahun depan. Yang kedua terbanyak adalah kita merekrut dokter, bidan, dan perawat. Sebab, masih banyak Puskesmas yang belum memiliki dokter dan bidan. Bidan ini kita rekrut untuk penempatan di desa-desa agar kualitas kesehatan ibu hamil dan bayi lahir lebih bagus," jelas Syafrudin.

Untuk tingkat kesulitan tes, Syafrudin mengakui bahwa tahun ini memang lebih sulit. Namun, juga lebih obyektif. "Yang coba-coba 'bermain' pasti ketahuan. Apalagi bagi yang mencoba menenggung sistem seleksi bisa ditangkap. Yakintlah tidak ada kecurangan. Ini semua demi memperoleh calon ASN yang benar-benar kompeten dan kompetitif," tegasnya.

Oleh sebab itu, program Smart ASN menjadi agenda penting terutama untuk meningkatkan kualitas SDM dalam birokrasi dan mengejar *index human capital* Indonesia di kawasan ASEAN. Apalagi Indonesia tak bisa melepaskan diri dari percepatan era digital yang

dikenal dengan era industri 4.0. Untuk menghadapi era ini, SDM yang mumpuni menjadi kebutuhan yang amat penting.

"Kita sangat ingin setiap ASN bisa menguasai kompetensi teknis dasar, yakni TI, bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*. SDM kita amat besar. Kita harus mampu setara dengan Singapura, misalnya. Masak kita kalah dengan Qatar yang penduduknya hanya 1,7 juta jiwa," ujar Syafrudin.

KemenPAN-RB telah menata suatu mekanisme yang lebih komprehensif dan konkret. Tujuannya, orang-orang yang profesional yang sudah kita dapatkan benar-benar menduduki pos yang sesuai profesinya.

"Jangan ada lagi pegawai yang misalnya di dokter, tapi karena tidak dengan kepala daerah, dia diangkat jadi Ketua Bappeda. Ini dulu banyak terjadi. Kalau dia dokter, jika mendapat promosi jabatan yang harus Kadinkes. Yang *accounting*, ya di bidang keuangan. Kementerian lembaga harus ikut mengawal ini semua. Kita harus membangun aparat yang menyatu dengan rakyat sehingga negara ini bisa berjalan baik. Ini sumbuhan pemikiran saya untuk negara. Tujuannya, menyelaraskan rakyat dengan sistem ketatanegaraan yang tertata," pungkash Syafrudin. (TYS)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah menyusun suatu grand design Smart ASN. Ini merupakan sebuah rencana strategis untuk meningkatkan kualitas dan daya saing para aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Kita ingin memiliki ASN yang berintegritas, nasionalis, profesional, dan berwawasan global. Dunia saat ini sudah sangat terbuka. Pemerintahan di seluruh dunia hampir semuanya terbuka dan Pemerintahan, merupakan implementasi dari sebuah negara dalam periode tertentu. Pilar utamanya adalah ASN dan aparat lain dari negara ini contohnya TNI, Polri, dan penegak hukum lainnya. Pilar-pilar ini ingin berpadu menanggapi keinginan rakyat.

Hashtag Berita :

#PelaksanaanProgramNasional #ReformasiBirokrasi #ASN #KementerianPANRB #RPJMN #RPJP #MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia #RencanaKerjaPemerintah #KinerjaPegawai #GoodGovernment

Kualitas Birokrasi Dipertaruhkan

Kompetisi global yang kompetitif membutuhkan birokrasi pelayanan publik berkualitas dan inovatif. Pemerintah diharapkan tidak menurunkan standar kompetensi seleksi CPNS demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil tahun 2018 masih sangat jauh dari harapan sehingga ada formasi terancam tidak terpenuhi. Dalam situasi itu, pemerintah menyiapkan kebijakan khusus bagi mereka yang tidak lolos seleksi kompetensi dasar.

Ketegasan pemerintah dibutuhkan dalam menentukan arah kebijakan perekrutan calon pegawai negeri sipil tetap sesuai jalur awal. Hal ini penting agar kualitas birokrasi dalam pelayanan publik di era kompetisi global tidak dipertaruhkan.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, kualitas birokrasi bisa turun apabila pemerintah membuka kesempatan lagi bagi mereka yang tidak lolos seleksi kompetensi dasar (SKD). Pemerintah harus konsisten mengikuti standar kompetensi yang ditetapkan demi kualitas birokrasi.

"Jadi, kalau gagal, ya gagal saja, karena banyak pertaruhan ke depan kalau pemerintah masih berkompromi terhadap pelamar yang tidak lolos seleksi. Kalau kita masih berkompromi dengan kualitas *input* yang buruk, nanti kualitas pelayanannya buruk, birokrasi ikut buruk," ujar Robert di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Berdasarkan data sementara Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu, setidaknya data yang sudah masuk sekitar

2,096 juta peserta dari 2,8 juta peserta yang mengikuti tes SKD. Data itu terbagi menjadi empat wilayah, yakni wilayah timur, tengah, barat, dan pusat (kementerian/lembaga).

Peserta dinyatakan lulus ke tahap berikutnya jika memenuhi ambang batas tes karakteristik pribadi sebesar 143 poin, tes intelegensi umum (80), dan tes wawasan kebangsaan (75). Dari data yang masuk, persentase kelulusan terkecil ada di wilayah timur, yakni 1,44 persen, kemudian wilayah tengah (2,18 persen), barat (3,82 persen), dan pusat (13,69 persen). Mayoritas pelamar gagal dalam tes karakteristik pribadi.

Persentase kelulusan itu sangat jauh dari harapan apabila melihat kuota CPNS tahun ini sebanyak 238.015 formasi. Dari total formasi, sebanyak 51.271 formasi untuk pemerintah pusat dan 186.744 formasi untuk pemerintah daerah.

Jangan dikorbkan

Robert menyadari bahwa saat ini pemerintah dalam posisi dilematis karena dihadapkan pada formasi yang masih banyak kosong. Namun, pemerintah juga tak boleh terus-menerus menoleransi setiap ada masalah berkaitan dengan rendahnya kualitas. Seperti diketahui, pada proses seleksi CPNS tahun 2017, pemerintah menerapkan sistem ranking untuk sekadar memenuhi kuota formasi.

"Tentu kita membutuhkan tenaga kesehatan dan guru, te-

tapi jangan sampai kita mengorbankan kualitas dengan menurunkan ambang batas kelulusan atau memakai ranking karena keduanya sama-sama buruk. Tahun ini harus menjadi penarik batas bahwa praktik yang kemarin, praktik yang lama itu tidak benar. Kalau pemerintah masih coba otak-atik dengan apa yang sudah ditetapkan, ini akan menimbulkan ketidakpercayaan dan ke depan reformasi birokrasi tak akan terkontrol," tutur Robert.

Tidak kompeten

Secara terpisah, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, penurunan ambang batas untuk seleksi CPNS tahun ini kemungkinan besar tidak akan diambil. Menurut dia, ada potensi kebijakan khusus yang akan diambil untuk mengakomodasi mereka yang tidak lulus tes SKD adalah dengan sistem ranking.

Sistem ranking adalah peserta yang ikut seleksi kompetensi bidang diambil dari ranking teratas sesuai akumulasi hasil tes SKD. "Jika ambang batas diturunkan, dikhawatirkan pegawai yang diterima tidak kompeten," ujar Bima.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji pun menyatakan pemerintah masih menyusun peraturan terkait kebijakan ini.

"Kami harapkan minggu depan sudah ditandatangani," ujar Dwi. (BOW)

KUALITAS BIROKRASI DIPERTARUHKAN

Dalam situasi ini, pemerintah menyiapkan kebijakan khusus bagi mereka yang ikut seleksi kompetensi dasar. Kemudian ketegasan pemerintah dibutuhkan dalam menentukan arah kebijakan tetap pada jalur awal sehingga kualitas birokrasi tidak menjadi taruhannya dan kualitas birokrasi bisa mundur apabila pemerintah masih membuka kesempatan bagi mereka yang tidak lolos seleksi kompetensi dasar (SKD). Pemerintah harus konsisten mengikuti standar kompetensi yang telah ditetapkan untuk menjaga kualitas birokrasi.

Hashtag Berita :

#CPNS #ReformasiBirokrasi
#KinerjaPegawai #GoodGovernment
#PelaksanaanProgramNasional #ASN
#KementerianPANRB #RPJMN #RPJP
#RencanaKerjaPemerintah